

Intisari

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah potensi pendapatan bagi Pemerintah Kabupaten Gresik, dan sebagai sumber paling penting untuk pendapatan lokal karena menyumbang sebesar 28,37% dari jumlah total pendapatan, pada tahun 2012 dengan peraturan UU nomor 28 tahun 2012 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) diserahkan pengelolaannya ke daerah, dan untuk sampai dalam penetapan pajak pemerintah daerah harus menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) dan Sistem Informasi dan Manajemen Objek Pajak (SISMIOP), tetapi peta blok yang digunakan sebagai peta dasar SIG untuk mengidentifikasi objek pajak tidak terbaru karena peta tersebut dibuat pada tahun 1998 dan pembaruan terakhir pada tahun 2007, setiap tahun banyak objek pajak melakukan perubahan baik penggabungan, pemecahan dan dijual atau di hibahkan, sehingga peta ini dikatakan tidak terbaru jika digunakan untuk menunjukan objek pajak di lapangan.

Penelitian ini mnggunakan studi kasus di Desa Lampah, dengan metode digital analisis dengan melakukan *overlay* peta blok dan peta citra untuk perbaikan peta, dilanjutkan dengan menggabungkan data DHKP dengan peta blok untuk melakukan identifikasi objek pajak dan survey lokasi untuk memastikan lokasi objek pajak. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan proses pengelolaan PBB harus dilakukan sesuai SOP yang berlaku meskipun hanya pembaruan peta pajak, karena didalam penelitian ini kami menemukan perbedaan 416 bidang objek pajak dikarenakan peta tidak diperbarui, dengan nilai ketetapan pajak Rp8.614.229,00 dan dapat menghilangkan potensi pajak daerah.

Kata Kunci : Pajak Bumi dan Bangunan, Peta Blok, Pendapatan Asli Daerah

Abstract

Regional income is potential area resource for local government, it is can discover more optimal for local revenue, local government have full power to use in organize development local government, local tax is taxpayer contribution to local government and used to the property of her people. In Gresik local tax is important source for local income, contribute to total income in Gresik amount 28,37%. In 2012 property tax manage by local government that controled with UU number 28 tahun 2012 about local tax and user charges, to manage property tax local government must use GIS, SISMIOP to set tax assessment. But block map based on GIS which in used know tax object created in 1998 and last update in 2007, every year many tax is improving , to combined, or separated, sell or give to other. It is make the map not valid when we used to know real tax object

This research with case study in Lampah vilage with digital methodes using digital technic to overlay block map with satelite map for fix the map, and join DHKP data in block map to identification tax object and field survey to ensure the location of tax object. The result of this research can be concluded the process of tax assessment must be use SOP, although updating map. In the research we find the difference 416 field of tax object that is not updated on the map, with a tax assessment of Rp8.614.229,00 and can eliminate the potential of local taxes

Keywords : Property Tax, Block Map, Regional Income